

BIPA Pendukung Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Liliana Muliastuti, Ketua Umum Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA

Pengantar

Optimisme terhadap peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional cenderung menguat belakangan ini. Sikap pemerintah, diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), juga memunculkan angin segar. Agenda tahunan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusdiklat Kemdikbud, Sawangan, Jawa Barat, 21-23 Februari 2016, secara khusus juga mengagendakan persoalan internasionalisasi bahasa Indonesia. Dari tujuh komisi yang membahas beragam tema masalah pendidikan dan kebudayaan, masalah bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional menjadi pokok bahasan komisi lima. Laporan komisi lima menyatakan ada tiga hal besar yang perlu dilakukan untuk internasionalisasi bahasa Indonesia: (1) penyebarluasan bahasa Indonesia melalui pengajaran BIPA, (2) pengayaan kosakata baru bahasa Indonesia, dan (3) penumbuhan budaya literasi.

Hal yang dibicarakan pada Rembuk Nasional tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang (UU) No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Bagian keempat UU tersebut membahas perihal peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional dan memuat pasal 44 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹

Tiga pasal di atas bukanlah pasal yang dapat diabaikan begitu saja. Setiap warga negara Indonesia sudah sewajarnya mengetahui hal tersebut. Tanpa mengabaikan bahasa yang lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara harus terus ditingkatkan.

Sayangnya, saat ini masih banyak warga Indonesia yang tidak mengetahui ketentuan UU tersebut. Beberapa pengamat bahasa justru menangkap fakta bahwa masyarakat Indonesia saat ini mengarah pada pengabaian bahasa Indonesia dan lebih bangga berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, di tempat umum.

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus berusaha melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Pemerintah juga menyelenggarakan program Darmasiswa yang dikelola Biro Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Kemendikbud.

Darmasiswa adalah program beasiswa yang ditawarkan kepada semua mahasiswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, seni, musik, dan kerajinan. Peserta dapat memilih salah satu dari 45 universitas di berbagai kota di Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Program tersebut dimulai tahun 1974 sebagai bagian dari inisiatif ASEAN (Asosiasi Negara Asia Tenggara) dan hanya berlaku untuk para siswa dari ASEAN. Pada tahun 1976 program ini diperluas mencakup siswa dari negara lain seperti Australia, Kanada, Perancis, Jerman,

¹ Pusat Bahasa, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, (Kemendiknas: Jakarta, 2010), h. 17.

Hungaria, Jepang, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, dan Amerika Serikat.

Pada awal '90-an, tawaran program ini kemudian diperluas mencakup semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tujuan utama dari program Darmasiswa adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan minat terhadap bahasa dan budaya Indonesia di kalangan pemuda dari negara lain. Hal ini juga diharapkan dapat membentuk jejaring budaya yang kuat untuk membina pengertian antara negara peserta.²

Data pada situs *darmasiswa.kemdiknas.go.id* mengungkapkan minat mahasiswa asing yang mengikuti program tersebut semakin meningkat. Jumlah alumni pada tahun 2008 sudah mencapai 2.037 dari 85 negara.³ Peningkatan peminat terus terjadi. Data BPKLN Kemendikbud saat pembukaan program Darmasiswa tahun 2012 mengungkapkan sekitar 2.400 mahasiswa asing dari berbagai negara telah mendaftar untuk menjadi peserta program. Namun, hanya 750 mahasiswa yang berhasil lolos seleksi untuk mengikuti program selama satu atau dua semester. Peserta Darmasiswa yang berasal dari 77 negara tersebut akan disebar ke-59 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2012, total mahasiswa asing yang mengikuti Darmasiswa sejak 1974 berjumlah 3.986 orang yang berasal dari 97 negara.⁴

Paparan di atas menggambarkan bahwa minat orang asing belajar bahasa Indonesia terus meningkat. Pada 28 Januari 2016, Badan Bahasa telah mengundang sejumlah pihak untuk mendiskusikan peluang pengembangan profesi pengajar BIPA. Dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Bahasa mengungkapkan pihaknya menerima permintaan pengiriman pengajar BIPA dari 181 lembaga di dunia. Termasuk, dari negara-negara seperti Australia (38 lembaga dan empat balai bahasa), Jepang (37 lembaga), Thailand (16 lembaga), Italia (10 lembaga),

² *darmasiswa.kemdiknas.go.id* (diakses pada 12 September 2012).

³ *ibid.*

⁴ *Ibid.*

Perancis (5 lembaga), dan Filipina (10 lembaga). Ini belum termasuk permintaan untuk sekolah-sekolah menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan di negara-negara ASEAN yang serius menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Uraian di atas memperlihatkan telah cukup banyak negara yang melaksanakan pembelajaran BIPA. Bukan tidak mungkin, angka tersebut akan terus bertambah. Masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah apakah internasionalisasi bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui pengajaran BIPA? Jika ya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan amanah UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tersebut?

B. Kondisi Pengajaran BIPA Selayang Pandang

Bahasa Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara di Indonesia telah digunakan oleh lebih dari 240 juta orang penduduk Indonesia (Data bulan Juli 2009: *CIA The World Fact Book*). Bahasa Indonesia juga digunakan di negara-negara berbahasa Melayu seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan masyarakat di benua lain. Diperkirakan ada 46 negara mengajarkan bahasa Indonesia kepada para siswa atau mahasiswa, seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, Rusia, Korea, Jepang, Jerman, dan lain-lain.⁵ Peningkatan jumlah peminat tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan mutu pengajaran BIPA.

Pengajaran BIPA memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asli. Salah satu pembedanya adalah dari segi pemelajarnya. Pemelajar BIPA adalah pemelajar yang telah memiliki bahasa pertama (B1) dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, tujuan pemelajar BIPA juga sangat beragam. Ada pelajar yang bertujuan hanya untuk belajar percakapan praktis saja, untuk mampu membaca, menulis, dan

⁵ *Kompas*, 29 Oktober 2009.

yang bertujuan untuk studi di Indonesia. Usia pemelajar yang beragam harus menjadi perhatian dalam pembelajaran BIPA. Pendekatan yang digunakan pengajar BIPA pada siswa asing berusia remaja tentu berbeda dengan yang berusia setengah baya. Perbedaan pendekatan ini pun akan berimbas pada metode, teknik, dan media yang digunakan.

Sebagaimana dikemukakan dalam Politik Bahasa Nasional, pengajaran BIPA merupakan salah satu kegiatan pembinaan. Untuk pelaksanaannya, perlu dilakukan (a) pengembangan kurikulum, (b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran BIPA, (c) pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional, dan (d) pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji kemahiran bahasa.⁶

Pengembangan kurikulum pengajaran BIPA saat ini belum ada keseragaman. Setiap lembaga mengembangkan kurikulumnya sendiri. Buku-buku ajar BIPA juga sangat beragam baik dari segi materi maupun kualitasnya. Bahan ajar yang tersedia untuk pengajaran BIPA sebenarnya cukup banyak. Para pengajar dapat mengambil bahan ajar dari berbagai sumber, bukan hanya buku. Sumber tersebut dapat berasal dari berbagai media, baik cetak maupun noncetak. Di samping itu, para pengajar sebenarnya dapat mencari bahan ajar BIPA sesuai dengan kebutuhan siswa melalui internet.

Sementara ini buku-buku BIPA yang tersedia dapat diklasifikasikan atas dua kategori: buku BIPA yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan yang menggunakan bahasa pengantar B1 siswa. Kedua kategori tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kategori *pertama*, para siswa dimotivasi untuk belajar keras memahami bahasa Indonesia secara langsung. Kelemahannya, jika pengajarnya bukan penutur asli bahasa Indonesia, kesalahpahaman sangat mungkin terjadi.

⁶ Pusat Bahasa, *Politik Bahasa Nasional*, (Depdiknas: Jakarta, 2003), h. 2-3.

Sebaliknya, buku BIPA jenis *kedua* akan membuat siswa belajar dengan metode terjemahan. Siswa tidak aktif mencari makna kata pada kamus karena semua materi telah diterjemahkan dalam bahasa pertama mereka. Kelebihannya, pengajar yang ber-B1 bahasa tersebut akan mudah memahaminya.⁷ Jadi, guru sebaiknya memvariasikan buku yang digunakan dalam pembelajaran BIPA.

Tenaga pengajar BIPA saat ini masih sangat bervariasi. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, para pengajar dapat diklasifikasikan berlatar belakang :

- (1) pendidikan bahasa Indonesia (S1 dan S2),
- (2) berpendidikan bahasa Inggris atau bahasa asing, dan
- (3) tidak berlatar belakang pendidikan bahasa.

Dalam hal tenaga pengajar, belum ada standarisasi kompetensi pengajar BIPA. Para pengajar memiliki berbagai latar belakang ilmu. Contoh di Korea Selatan, tenaga pengajar BIPA ada yang berlatar belakang bahasa Inggris, bahasa Malaysia, dan bahasa Indonesia. Begitu pula di negara lain, seperti Uzbekistan. Ada pengajar di Uzbekistan yang hanya berlatar belakang S1 bahasa Inggris dan lulusan kursus bahasa Indonesia program satu tahun yang diselenggarakan KBRI di sana, lalu mengajar mata kuliah bahasa Indonesia.

Hingga saat ini, **belum ada program sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional untuk pengajar BIPA**. Dengan kondisi ini, mutu pengajaran BIPA belum dapat dikatakan berkualitas karena belum ada penstandaran tentang hal tersebut. Kondisi yang demikian perlu menjadi pikiran bersama para pakar, pengajar, dan pegiat BIPA yang tergabung dalam Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA (APPBIPA).

Sarana pembelajaran untuk pengajaran BIPA juga masih harus ditingkatkan. Harus diakui belum semua lembaga penyelenggara program BIPA menyediakan sarana pengajaran BIPA yang memadai. Padahal, pengajaran BIPA

⁷Liliana Muliastuti, *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing BIPA* (Penelitian yang tidak dipublikasikan: Universitas Negeri Jakarta, 2005), h.33.

memerlukan sarana pengajaran yang tepat. Jika siswa BIPA belajar langsung di Indonesia, penggunaan kaset rekaman percakapan mungkin tidak terlalu diperlukan. Siswa BIPA dapat diajak langsung mengunjungi tempat-tempat seperti pasar, supermarket, rumah sakit, apotek, sekolah, salon, tempat penukaran uang, dan lain-lain. Di Indonesia, para siswa dapat belajar percakapan secara langsung. Namun, jika situasi belajar terjadi di negara asing, pengajaran akan lebih banyak memerlukan berbagai sarana seperti kaset rekaman, CD pembelajaran, gambar, contoh-contoh real, dan sebagainya.

Kondisi ini menjadi pemikiran bersama antara Badan Bahasa dan APPBIPA. Beberapa kegiatan untuk menstandarkan pengajaran BIPA telah dilakukan. Badan Bahasa bersama APPBIPA dan pakar BIPA dari berbagai perguruan tinggi telah mulai menyusun rancangan:

- (1) standar kompetensi minimal pemelajar BIPA,
- (2) standar pengajar BIPA,
- (3) kurikulum Pendidikan Profesi Guru BIPA,
- (4) kurikulum S2 Magister Pendidikan BIPA, dan
- (5) materi ajar BIPA.

Semua rancangan tersebut sudah tentu masih memerlukan proses panjang dan memerlukan dukungan semua pihak. Di samping itu, uji kemahiran BIPA juga menjadi salah satu komponen yang disiapkan pemerintah untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Penutup

Amanah yang termuat pada UU Nomor 24 tahun 2009 harus segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan, terutama para penyelenggara BIPA bersama pemerintah (Badan Bahasa). Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengajaran BIPA harus berupaya memiliki standar pembelajaran yang memenuhi kualifikasi nasional dan internasional.

Internasionalisasi bahasa Indonesia sudah semestinya dilakukan melalui peningkatan peran pengajaran BIPA. Pengajaran BIPA harus terus dilakukan baik di dalam maupun di luar Indonesia. Dengan demikian, jumlah penutur terus bertambah dan area penggunaan bertambah luas. Untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, penyelenggara pengajaran BIPA harus didukung oleh semua lembaga yang relevan. Faktor lain yang turut mempengaruhi minat penutur asing seperti stabilitas politik, keamanan, dan perekonomian Indonesia juga harus menjadi perhatian pemerintah. Jika ketiga hal tersebut diabaikan, sulit untuk mencapai amanah UU tersebut.

Berbagai program telah dilakukan dan harus dituntaskan, berikut ini adalah program yang harus segera dikerjakan oleh pemerintah bersinergi dengan APPBIPA dan lembaga lain:

- (1) sertifikasi pengajar BIPA,
- (2) sertifikasi penyelenggara BIPA dengan menyiapkan standar penyelenggara program BIPA, dan
- (3) peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Badan Bahasa dengan seluruh pemangku kepentingan BIPA.

Jika hal-hal tersebut dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, internasionalisasi bahasa Indonesia akan dapat diwujudkan melalui pengajaran BIPA.

Pustaka Rujukan

Kompas, 29 Oktober 2009.

Muliastuti, Liliana. *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing BIPA* (Penelitian yang tidak dipublikasikan). Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2005.

Pusat Bahasa. *Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kemendiknas, 2010.

_____. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Depdiknas, 2003.